

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN KEUANGAN PADA
INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**HERMIN
105730466914**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Makassar)**

HERMIN

10573 04669 14

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S Al Baqarah: 113)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al Insyirah: 6-8)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT. atas rahmat yang diberikan
- Ibu, Bapak, serta kakak dan adikku tersayang yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan.
- Teman-teman terkasihku², nert-nertku, AK2-2014 serta seluruh pihak yang selalu men-support dan menyertai...



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "EFEKTIFITAS PENGAWASAN KEUANGAN PADA
INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR."

Nama : HERMIN
Nim : 105730466914
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Sripsi ini telah dipenksa dan diajukan di depan Tim
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 09 Februari 2019 pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Februari 2019

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Buyung Romadhoni, SE.,MSi
NIDN: 0028087801

Pembimbing II

Saida Said, SE.,M.AK
NIDN: 1151806

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rasuonda, SE, MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM: 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221








بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama HERMIN, NIM: 105730466914, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0001/2019 M, Tanggal 18 Safar 1440 H/ 09 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

04 JUMADIL AKHIR 1440 H
Makassar, _____
09 FEBRUARI 2019 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof.Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris | : Dr. Agussalim, HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji | : 1. Dr. ANSYARIF, SE.,M.Si.,Ak |  |
| | 2. MIRA, SE., M.Ak |  |
| | 3. FAIDUL ADZIM, SE., M.Si |  |
| | 4. SAMSUL RIZAL, SE., MM |  |

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMIN
Stambuk : 105730466914
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "EFEKTIFITAS PENGAWASAN KEUANGAN PADA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

04 JUMADIL AKHIR 1440 H
Makassar, _____

09 FEBRUARI 2019 M

Yang Membuat Pernyataan.



Diketahui Oleh:

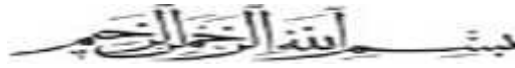
Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE. MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM: 1073428

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “**Efektifitas Pengawasan Keuangan Pada Inspektorat Kota Makassar**” dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.CA.CSP selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Buyung Romadhoni,SE.,MM dan Ibu Saida Said, SE.,M.AK selaku Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Kedua orang tuaku,serta saudara-saudaraku penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehatnya dan dukungannya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang,.
7. Pimpinan serta pegawai Inspektorat Kota Makassar yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Buat teman-teman akuntansi 2 angkatan 2014 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
9. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki.Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya.Amin.

Makassar, 2018

Penulis

ABSTRAK

HERMIN, (2018) Efektifitas Pengawasan Keuangan Pada Inspektorat Kota Makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Buyung Rhomadhoni dan Pembimbing II Saida Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengawasan keuangan yang dilakukan pada Inspektorat Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dimana data diperoleh Data primer pada penelitian ini yaitu kuesioner yang dibagikan pada karyawan inspektorat. Responden penelitian adalah auditor internal dan anggota tim audit yang terlibat langsung dalam pelaksanaan audit internal dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Kuesioner diolah dengan menggunakan skala *Guttman*. Hasil analisis disimpulkan bahwa persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan dan penunjang proses pengawasan telah berjalan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Makassar adalah meliputi aparatur yang memiliki skill (telah mengikuti DIKLAT), pengetahuan dibidang pekerjaan yang ditangani, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan di kota Makassar yang dilakukan oleh inspektorat kota Makassar.

Kata kunci: pengawasan keuangan.

ABSTRACT

HERMIN (2018). *Role In financial supervision Inspectorate Epektifitas Makassar city, Courses in accounting and Business Economics University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Mentors I Dr. Rhomadhoni Jars and Supervisor II Saida Said.*

This research aims to know the effectiveness of financial supervision Inspectorate conducted in Makassar city. This research using quantitative research methods. Data obtained primary Data on research is a questionnaire that was distributed at the Inspectorate employees. The respondents of the research was the auditor and internal audit team members directly involved in the implementation of internal audit and inspection of the financial report of the Government of the region. A questionnaire processed by using scale Guttman. The results of the analysis it was concluded that persiapa supervision, supervision of implementation, preparation of reports and supporting the process of supervision has been running effectively. Factors that affect the Organization of the Superintendence function against the conduct of the Government in the city of Makassar was covering apparatus that has skill (have followed TRAINING), knowledge in the field of jobs handled and infrastructure supporting the implementation of supervision in Makassar city which first by the Inspectorate of the city of Makassar.

Keywords: *financial supervision.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengawasan	7

B. Konsep pengawasan.....	17
C. Konsep efektifitas.....	30
D. Penelitian terdahulu	37
E. Kerangka fikir	42
BAB III. METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan sumber penelitian.....	44
B. Tempat dan waktu penelitian.....	44
C. Defenisi operasional.....	44
D. Populasi dan sampel.....	45
E. Metode pengumpulan data.....	46
F. Metode analisis	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran umum objek penelitian.....	48
B. Deskriptif data atas variabel penelitian	53
C. Hasil penelitian.....	60
D. Pembahasan.....	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1	Distribusi Pengambilan kuesioner	53
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Usia	56
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja	59
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Atas Efektifitas Pengawasan Pada Tahap Pengawasan	61
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Atas Efektifitas Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan Pengawasan	62
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Atas Efektifitas Pengawasan Pada Tahap Penyusunan Pelaporan	63
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Atas Efektifitas Pengawasan Pada Tahap Penunjang Proses Pengawasan	64

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	KerangkaPikir	43
Gambar 3.1	Struktur Organisasi	51
Gambar 4.1	Tingkat Pengambilan Kuesioner	54
Gambar 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Gambar 4.3	Data Responden Berdasarkan Usia	57
Gambar 4.4	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
Gambar 4.5	Data Responden Berdasarkan Lama Kerja	60

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1	Kuesioner Penelitian	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan sistem otonomi daerah (OTODA) dalam bingkai pembangunan nasional, dengan diberlakukannya dua paket kebijakan yakni undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan resolusi aspiratif pembangunan nasional. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antara tingkat pemerintahan menjadi tuntutan setiap daerah otonomi.

Penerapan otonomi daerah sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Lebih khusus bahwa undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan

pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.

Otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sehingga konsekuensi dari pelaksanaan OTODA dan tuntutan pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*) adalah bahwa pemerintah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata, namun dalam proses pelaksanaan otonomi daerah baik, aturan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan tidaklah menjamin untuk dijalankan dengan baik, lagi-lagi realitas pembangunan menyatakan kita akan krisis moral oleh pelaksana pembangunan yang berujung pada kecenderungan adanya penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan semangat otonomi daerah dan tuntutan pemerintahan yang *good governance*, maka diharapkan kepada setiap pemerintah daerah dan lebih khusus pemerintah daerah Kota Makassar agar dalam menjalankan tugas dan wewenang pembangunan daerah utamanya yang menyangkut dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) agar semaksimal mungkin meningkatkan fungsi pengawasan secara efisien dan efektif dan rangka membangun pemerintahan daerah yang governance demi mewujudkan cita-cita pembangunan Nasional daerah.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Victor (1994, hal. 28) mengemukakan bahwa Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Makassar yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu : Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan dilakukan sendiri oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat

mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kota Makassar tersebut di atas, maka keberadaan Badan Pengawasan Daerah merupakan instansi vertical dari Badan Pengawasan yang ditugaskan di Kota sebagai aparat pengawasan umum, dimana dalam melakukan pengawasan tugas-tugas secara administrative maupun operasional diperlukan adanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Bupati dalam pelaksanaan pengawasan maupun kedudukannya sebagai instansi vertical yang bertanggungjawab kepada Inspektorat Daerah Kota Makassar. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan pemerintahan daerah, khususnya di Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Dikeluarkannya peraturan daerah Kota Makassar No. VII Tahun 2005 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Enrekang, maka penamaan untuk Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) berubah menjadi Inspektorat. BAWASDA atau Inspektorat melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melakukan

pengawasan keuangan pada instansi / kantor (BUMD) milik pemerintah. Sebagai suatu lembaga pemerintahan yang tugas utamanya membantu Bupati dalam bidang pengawasan dan pengendalian keuangan dan pembangunan didaerah, diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, sehingga proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan didaerah dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “ **EFEKTIFITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR** ”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, untuk mengetahui efektivitas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan kepada Inspektorat Kota Makassar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan.
2. Sebagai referensi dan informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat, untuk mengetahui tentang kinerja Inspektorat Kota Makassar, khususnya tentang pengawasan Keuangan Daerah.

3. Sebagai bahan masukan untuk pengembangan Ilmu Akuntansi sektor publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Keuangan Daerah.

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Winardi (2010) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Sedangkan menurut Basu Swasta "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Sedangkan menurut Komaruddin "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan

standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya." Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari

fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” Atau *“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”*

2. Pengawas Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (APBD) peraturan pemerintah republik Indonesia (PP.RI) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (PP No. 105 2000). Dalam pasal 4 dan 5

dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Menurut Mamesah (2008) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain lai sesuai ketentuan dan perundangan. Adapun Menurut Moneyzar Usman (2010) mengemukakan bahwa Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan menyangkut upaya dalam mendapatkan maupun membelanjakannya, sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan.

Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud UU No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui usaha penggalian sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. PAD merupakan salah satu modal dasar

pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD terdiri dari:

1) Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat didasarkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah

Hasil Perusahaan Milik Daerah adalah laba perusahaan daerah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaan perusahaan daerah haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi.

4) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan selain pajak, retribusi, maupun perusahaan daerah, antara lain adalah hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

b. Dana perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut termasuk kredit jangka pendek.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, terdiri dari:

- 1) Bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam.
- 2) Dana Alokasi Umum.
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- 1) Hak untuk daerah untuk memungut pajak daerah dan restribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan.
- 3) Penerimaan daerah.
- 4) Pengeluaran daerah.

- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum (PP No. 58 2005)

3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

a. Pengertian Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Belanja Daerah (APBD) di tetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut UUD No. 32 tahun 2003 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun yang dibahas serta disetujui bersamaan dengan DPRD dan pemerintah daerah.

Menurut Alteng Syafruddin, APBD adalah rencana kerja pemerintah daerah untuk satu tahun kerja tertentu dimana didalamnya terdapat rencana pendapatan serta pengeluaran untuk satu tahun tersebut.

Menurut M. Suparmo, APBD adalah anggaran yang terdapat daftar rinci jenis dan jumlah pengeluaran serta penerimaan daerah dalam satu tahun.

4. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Penyusunan Rancangan APBD

- 1) Rencana Kerja Pemerintahan daerah
- 2) Kebijakan Umum APBD
- 3) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- 5) Penyiapan Raperda APBD

b. Penetapan APBD

- 1) Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- 2) Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBD Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi

disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

c. Pelaksanaan APBD

- 1) Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- 2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- 3) Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- 4) Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

5) Laporan Realisasi semester Pertama APBD dan perubahan APBD Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

5. Tujuan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tujuan APBD seperti yang tercantum pada peraturan daerah adalah sebagai landasan atau pedoman pemerintah daerah untuk menentukan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan daerah agar menghindari terjadinya pemborosan, kesalahan dan penyelewengan.

Beberapa tujuan penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah
- 2) Menciptakan keadilan dan efisiensi
- 3) Menentukan prioritas belanja daerah
- 4) Mewujudkan transparansi terhadap masyarakat.

6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kepala SKPD selaku pengguna menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan

yang disampaikan kepada daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Konsep Pengawasan

1. Pengertian, Proses Pengawasan dan Tujuan Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Berikut beberapa pendapat tentang pengertian pengawasan, antara lain :

Menurut Hendry Fayol. Dalam Harahap S.S. (2010 :10), bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dipakai untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Menurut Victor M. Raharjo Adisasmita. (2011), bahwa setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Menurut Sujanto. Dalam Harahap S.S. (2008 : 11), seorang yang berkecimpun dalam pengawasan keuangan negara, mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan

untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Kemudian menurut Sondang P. Siagian. Raharjo Adisasmita, (2011), bahwa suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamain agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan. Raharjo Adisasmita, (2011), bahwa salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Selanjutnya menurut Terry G.R. dalam Harahap S.S. (2008 : 11), bahwa pengawasan yaitu suatu usaha meneliti kegiatan yang telah serta akan dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk mrnyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Williams C. (2009 : 273), bahwa pengawasan (pengontrolan) merupakan proses umum dari standar baku untuk mencapai tujuan organisasi. Membandingkan pelaksanaan aktual dengan standard-standar tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan apabila diperlukan.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala masa dimasa yang akan

datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang dikerjakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang dicapai.

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan pengawasan.

Dari beberapa pengertian pengawasanyang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan dapat menjamin kesesuaian tindakan dengan rencana kepada pencapaian tujuan organisasi.

pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsure pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Dengan begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi **manajemen lainnya.**

b. Proses Pengawasan

Untuk melaksanakan pengawasan para peneliti dan praktisi telah mencoba meluruskannya dalam bentuk prosedur atau proses kegiatan yang dilalui dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berikut beberapa pendapat, antara lain :

Menurut Belkaoui. Dalam harahap S.S. (2009 : 35), bahwa langka umum yang diikuti dalam proses pengawasan, meliputi :

- 1) Penyusunan tujuan.
- 2) Penetapan standard.
- 3) Pengukuran hasil kerja.
- 4) Perbandingan fakta dengan standard.
- 5) Perbaikan tindakan koreksi.

Kemudian menurut Williams C. (2010 : 274), bahwa proses pengontrolan terdiri dari :

- 1) Standard, merupakan dasar perbandingan untuk mengukur tingkat pelaksanaan organisasi yang beraneka ragam adalah memuaskan atau tidak memuaskan. Kriteria pertama untuk standar yang baik adalah bahwa hal tersebut harus mampu mencapai tujuan.
- 2) Perbandingan standard, adalah membandingkan prestasi aktual dengan standard-standar prestasi.
- 3) Tindakan perbaikan, adalah mengidentifikasi penyimpangan prestasi, menganalisisnya, kemudian mengembangkan, dan melaksanakan program-program untuk memperbaikinya.
- 4) Proses dinamis, bahwa pengontrolan merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan. Hal itu dimulai dengan prestasi nyata dan mengukur prestasi tersebut.
- 5) Pengontrolan umpan balik adalah mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang ketidak sempurnaan prestasi setelah terjadi.

c. Tujuan pengawasan

Tujuan pengawasan yaitu, sebagai berikut :

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan

- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah

2. Aspek-Aspek Dalam Pengawasan

a. aspek-aspek dalam pengawasan

Aspek-aspek penting dalam pengawasan APBD adalah :

- 1) Aspek Legal, bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, sehingga jelas kemana meminta pertanggungjawabannya.
- 2) Aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban (stewardship), bahwa bagaimana APBD dapat melindungi dan meningkatkan asset fisik dan non fisik daerah, bagaimana mencegah terjadinya pemborosan dan terjadinya salah arus.
- 3) Aspek pengeluaran daerah, bahwa setiap pengeluaran harus berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, hasil manfaat yang akan dicapai.

b. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasak keuangan negara dan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. Menurut Baswir .Manajemen keuangan daerah dalam Abdul Halim. (2009 : 307), bahwa berdasarkan pengertiannya pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut obyeknya, pengawasan APBN / APBD,

pengawasan BUMN / BUMD, maupun pengawasan barang-barang milik negara dan daerah lainnya.

Pengawasan bukan tahap tersendiri dari daur anggaran walaupun pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan negara dan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu bila dikaitkan dengan daur anggaran, maka pengawasan keuangan meliputi tahap penyusunannya, tahap pelaksanaannya, maupun tahap pertanggung jawabannya, dengan kata lain pengawasan anggaran sudah harus dimulai sejak tahap penyusunannya dan baru berakhir pada tahap pertanggung jawaban.

c. Jenis Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan negara dan daerah menurut ruang lingkupnya dibedakan menurut jenis, yaitu :

1) Pengawasan intern, dapat dibedakan menjadi dua :

- (a) Pengawasan intern dalam arti sempit, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri atau ketua lembaga negara. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dalam arti sempit adalah inspektorat jendral departemen (IRJENDEP), inspektorat wilayah propinsi (ITWILPROP), inspektorat wilayah daerah kabupaten (ITWILKAB), inspektorat wilayah daerah kota (ITWILKOT).

- (b) Pengawasan intern dalam arti luas, pada dasarnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknya hanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas dan pejabat yang diawasi, dalam arti pengawas dan pejabat yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara tetapi masih dalam struktur organisasi pemerintahan. Fungsi pengawasan dalam arti luas ini diselenggarakan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPK) dan inspektorat pembangunan (IRJENDBANG).
- 2) Pengawasan ekstern, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada dalam organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Secara operasional, tugas pengawasan internal dilakukan oleh BPK.

Disamping itu dikenal pula pengawasan legislatif yang mempunyai arti adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR, DPRD tingkat I dan II terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Bentuk pengawasan yang masih termasuk pengawasan eksternal adalah pengawasan masyarakat, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan.

Merujuk pada pengertian pengawasan dan pengertian keuangan daerah yang dikemukakan, maka pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pengaturan dan pengelolaan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam bentuk APBD, dapat dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang digariskan untuk mencapai tujuan. Artinya pengawasan keuangan daerah dapat menjamin kesesuaian pengelolaan APBD dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Tujuan dan norma pengawasan keuangan daerah

1. Tujuan pengawasan keuangan daerah

Berkaitan dengan tujuan pengawasan keuangan daerah, maka menurut Abdul Halim. (2010 : 308), bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkan dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat pula segera dikenali, sehingga selanjutnya dapat pula segera diambil tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk memantau, mengukur, dan menilai agar memastikan

kepatutan dan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan APBD yang dapat disampaikan kepada kepala daerah (Bupati) dan pihak terkait lainnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

2. Norma pengawasan keuangan daerah

Dalam melakukan pengawasan, aparat pengawas fungsional pemerintah juga memiliki norma pelaksanaan. Arti norma pemeriksaan adalah patokan, kaidah atau aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan dan mutu laporan pemeriksaan yang dikehendaki.

Norma pemeriksaan manajemen keuangan daerah dalam Munir D., dkk.(2011 : 134), bahwa norma pemeriksaan terdiri dari:

a. Norma umum pemeriksaan :

- 1) Ruang lingkup pemeriksaan lengkap terhadap objek yang diperiksa, mencakup :
 - (a) Pemeriksaan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
 - (b) Penilaian tentang dayaguna dan kehematan dalam menggunakan sarana yang tersedia.
 - (c) Penilaian hasilguna atau manfaat yang direncanakan dari suatu program.
- 2) Pejabat yang berwenang menetapkan tugas pemeriksaan harus mempertimbangkan kebutuhan pemakai hasil

pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup dari suatu pemeriksaan tertentu.

- 3) Dalam segala hal yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, aparat individu maupun kolektif harus bertindak dengan penuh integritas dan objektivitas.
- 4) Pemeriksaan atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan, secara individu atau setidaknya secara kolektif harus mempunyai keahlian / kemampuan teknis yang diperlukan dalam bidang tugasnya.
- 5) Dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan laporan, pemeriksa wajib menggunakan keahlian / kemampuan teknisnya dengan cermat.

b. Norma pelaksana pemeriksaan :

- 1) Pekerjaan pemeriksaan harus direncanakan sebaik-baiknya.
- 2) Para pelaksana pemeriksaan harus diawasi dan dibimbing dengan sebaik-baiknya,
- 3) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan harus ditelaah dan dinilai secukupnya.
- 4) Sistem pengendalian manajemen (SPM) harus dipeleajari dan dinilai secukupnya untuk menentukan seberapa jauh sistem itu dapat diandalkan kemampuannya untuk menjamin ketelitian informasi, ketaatan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna.

5) Bukti yang cukup dan relevan harus diperoleh sebagai landasan yang layak untuk menyusun pertimbangan, kesimpulan, pendapat serta saran tindak periksa.

c. Norma pelaporan pemeriksaan :

1) Laporan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah serta kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Laporan pemeriksaan harus segera setelah selesai pekerjaan pemeriksaan dan disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan tepat pada waktunya.

3) Tiap laporan pemeriksaan harus memuat ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, disusun dengan baik, menyajikan informasi yang layak, serta pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah.

4) Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menilai dayaguna dan kehematan serta hasilguna program, harus :

(a) Memuat temuan dari kesimpulan pemeriksaan secara objektif serta saran tidak yang konstruktif.

(b) Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari kritik.

- (c) Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan bila ada.
 - (d) Mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan.
 - (e) Mengemukakan penjelasan pejabat objek yang diperiksa mengenai hasil pemeriksaan.
 - (f) Menyatakan informasi penting yang tidak dimuat dalam laporan pemeriksaan karena dianggap rahasia atau harus diperlukan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap laporan pemeriksaan yang bertujuan menyatakan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan harus memuat:
- (a) Sesuai pernyataan pendapat akuntan atau kelayakan laporan secara keseluruhan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku atau prinsip akuntansi lainnya yang diberlakukan secara khusus pada objek yang diperiksa, dan dilaksanakan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Bila pemeriksaan tidak dapat menyatakan pendapatnya, alasannya harus diungkapkan dalam laporan.
 - (b) Mengungkapkan informasi yang masih dipandang perlu oleh pemeriksa.

- (c) Uraian mengenai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan disertai pengaruhnya terhadap laporan keuangan objek yang diperiksa.

C. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilakukan. Efektivitas secara etimologi berasal dari kata dasar efektif yang artinya berhasil, ditaati. Berikut ini kami kutip beberapa pengertian efektivitas, antara lain :

Manajemen keuangan daerah dalam Abdul Halim A. (2010 : 164), bahwa Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam menggapai tujuan.

Manajemen keuangan daerah dalam Halim A. (2010 : 166), bahwa Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Selanjutnya menurut Steers R.M. manajemen keuangan daerah dalam halim A. (2010 : 166), bahwa Efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil menggapai tujuan yang layak dicapai.

Selain ketiga pendapat yang dikemukakan, pengertian efektivitas lebih khusus berhubungan dengan derajat keberhasilan pemerintah dalam hal urusan keuangan telah dikemukakan oleh Devas., dkk. (2010 : 43), bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan yang terukur atau nilai yang menunjukkan prestasi (keunggulan) dari suatu manajemen yang diterapkan untuk mencapai tujuan.

2. Faktor Penentu Efektivitas

Adapun faktor penentu efektivitas menurut Bana. Kebijakan dan manajemen keuangan daerah dalam Munir., dkk. (2010 : 45), sebagai berikut:

- 1) faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana.
- 2) Faktor stuktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik stuktur maupun fungsional.
- 3) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan / tugas.
- 4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.

- 5) Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berdayaguna untuk percepatan pencapaian sasaran / tujuan.

3. Pengawasan Yang Efektif

Pengawasan yang efektif menurut sarwoto (2010 : 28) yaitu :

- a. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
- b. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana perbaikan perlu dilaksanakan.
- c. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
- d. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
- e. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat
- f. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang diorganisasi
- g. Terkoordinasi dengan alairan kerja, kerana dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada keryawan yang memerlukannya
- h. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi

- i. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standard sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
- j. Diterimah para anggota organisasi, maupun mengarahkan tanggung jawab dan prestasi

4. Proses Pengawasan Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah dalam Abdul Halim (2010 :310.311) untuk mendapatkan hasil pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna, maka pelaksanaan pengawasan dibagi 4 (empat) tahap yaitu :

a. Persiapan pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat lebih terarah, diperlukan informasi umum tentang kegiatan/program yang diawasi.

Untuk itu diperlukan langkah:

- 1) Penentuan sasaran, ruang lingkup dan daerah/lokasi pengawasan
- 2) Penentuan susunan/komposisi tim pengawasan
- 3) Penyusunan program kerja pengawasan (PKP)
- 4) Pengumpulan dan penelahan data dan informasi umum termasuk kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku
- 5) Penentuan pengawasan

b. Pelaksanaan Pengawasan

Dalam tahap pelaksanaan pengawasan dilakukan kegiatan untuk mengidentifikasi bagian-bagian kegiatan atau program yang mengandung kelemahan yang memerlukan pengawasan lebih

mendalam. Terhadap kelemahan yang sudah diidentifikasi ini dikumpulkan fakta-fakta untuk memantapkan temuan hasil pengawasan sehingga dapat diberikan suatu pendapat, kesimpulan dan rekomendasi perbaikannya. Langkah-langkah pengawasan ini meliputi :

- 1) Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang diawasi
- 2) Pelaksanaan langkah kerja yang tersebut dalam program kerja pengawasan
- 3) Penuangan hasil pelaksanaan langka kerja pengawasan (PKP)
- 4) Pembicaraan temuan hasil pengawasan untuk memperoleh komentar/tanggapan dari objek yang diawasi.

c. Pelaporan hasil pengawasan

Dalam kegiatan pengawasan yang telah dilakukan harus dibuatkan laporan hasil pengawasan (LHP) secara tertulis. Untuk menyusun suatu laporan hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Me- review* kertas kerja pengawasan.
- 2) Menyusun konsep hasil pengawasan berdasarkan materi kertas kerja pengawasan yang telah di – review.
- 3) Membicarakan konsep laporan hasil pengawasan dengan pertanggung jawabanobyek yang diawasi.

Laporan hasil pengawasan ini antara lain bertujuan agar temuan, kesimpulan, rekomendasi dan komentar hasil pengawasan dikomunikasikan secara resmi kepada pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

d. Tindak lanjut hasil pengawasan

Agar rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan mencapai tujuan, maka pengawasan harus mengikuti tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Karena itu perlu diambil langkah-langkah;

- a. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut.
- b. Menegaskan kembali rekomendasi dalam hal tindak lanjut yang diusulkan tidak/belum dilaksanakan.

5. Syarat Efektifitas Pengawasan

Berkaitan dengan bagaimana efektifnya suatu pengawasan, maka berikut beberapa pendapat mengenai syarat-syarat agar pengawasan berjalan efektif, antara lain :

Menurut Certo. Sistem pengawasan manajemen (Manajemen Control System) dalam harahap S.S. (2008 : 44-45), bahwa agar pengawasan sukses, maka harus beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Sistem control tersebut hanya berlaku untuk suatu organisasi tertentu.
Artinya suatu sistem control tidak akan dapat berlaku untuk semua badan (lembaga).
- b. Kegiatan kontrol harus dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus, bukan hanya tujuan sektoral tetapi tetapi tujuan lainnya.
- c. Informasi untuk maksud kontrol harus diperoleh tepat waktu.
- d. Mekanisme kontrol harus dipahami semua orang yang ada dalam organisasi.

Kemudian Menurut Duncan sistem pengawasan manajemen (Management Control System) dalam Harahap S.S. (2008 : 45), mengemukakan beberapa sifat pengawasan yang efektif, sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus dikomunikasikan.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut oleh organisasi.
- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.
- d. Pengawasan itu harus fleksibel.
- e. Pengawasan harus ekonomis.

Sedangkan menurut Beiley. Sistem pengawasan manajemen (management control system) dalam Harahap S.S. (2008 : 45), mengemukakan beberapa syarat agar pengawasan dapat berjalan dengan efektifitas ditinjau dari kacamata akuntansi, antara lain :

- a. Struktur organisasi yang baik yang dapat menunjukkan secara jelas perbedaan antara hak dan kewajiban masing-masing pejabat.
- b. Sistem otorisasi dan tanggung jawab yang jelas.
- c. Struktur akuntansi yang baik yang memiliki ciri :
 - 1) Adanya daftar susunan perkiraan.
 - 2) Pedoman akuntansi.
 - 3) Daftar tugas yang jelas di antara para pegawai pelaksana.
 - 4) Menggunakan perkiraan kontrol.
 - 5) Selalu memakai dokumen yang sudah diberi nomor.
 - 6) Metode lain dianjurkan untuk digunakan sepanjang dapat memperkuat sistem pengawasan.

- d. Kebijakan personalia yang baik.
- e. Adanya badan atau staf internal auditor yang independen dan kuat.
- f. Dewan pengawasan (komisaris) yang kompeten dan aktif.

D. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Rinto H. Rondono, Jantje J. Tinango, Novi Budiarto, (2015)	Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten Minahasa	Untuk menganalisis apakah pendapatan dan belanja daerah dinas pendapatan daerah kabupaten minahasa telah dilaksanakan secara efisien dan efektif	Metode yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pedoman penilaian dan kinerja keuangan pada dinas pendapatan daerah kabupaten minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan sangat efektif
2	Dicka Bella, Murtiasari, Anita	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah	Untuk mengetahui secara empiris pengaruh sistem	Metode penelitian yang digunakan adalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

	Wijayanti, Endang Masito, (2017)	dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah	pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah	Purposive Sampling	pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan terdapat pengaruh antara kompetensi sumber dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Azhar Ruddin, (2015)	Efektivitas pengawasan khusus oleh inspektorat kabupaten sigi	Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengawasan khusus yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah kabupaten Sigi	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator tujuan pengawasan cukup efektif karena berkurangnya jumlah penelitian negara/daerah dan tidak adanya temuan berulang dari tahun sebelumnya
4	Novliemanopo, Debby Ch Rontisulu, Sri Murni (2011)	Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten	Tujuannya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah	Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan secara langsung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah kabupaten minahasa

		minahasa tenggara	kabupaten minahasa tenggara.	dari dinas terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan cara datang langsung ke kantor dinas yang bersangkutan dan metode analisis tabel	tenggara senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkat yang makin efisien dari tahun sebelumnya.
5	Anton Trianto, 2015	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang	Tujuannya untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah kota Palembang	Metode analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemendirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

6	Afrizal, Muhammad Arfan, Darwani, 2016	Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang	Tujuannya untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan pemda sabang.	Metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan kerangka peraturan perundangn-an pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, pengadaan barang dan jasa, akuntansi dan pelaporan, audit internal, pengelolaan aset, serta audit eksternal secara baik dan memadai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD di lingkungan pemda sabang.
7	Alisman, Abubakar Hamzah, Muhammad Nasir, 2014	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Aceh Barat	tujuannya untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten	Metode regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD kabupaten aceh barat sangat dipengaruhi oleh investasi sektor publik,

		Pada Masa Otonomi	Aceh barat pada era otonomi daerah		dan kemampuan daerah untuk mengali sumber-sumber pendapatan asli daerah sudah agak baik, kedepan diharapkan dapat lebih mengadakan intensifikasih dan ekstensifikasi PAD.
8	Novelya Suoth, Jantje Tinangon, Sintje Rondonuwu	Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan	Tujuannya untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dinas pengelola keuangan, pendapatan dan aset (DPKPA) kabupaten minahasa selatan.	Metode yang digunakan metode analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan kinerja keuangan pada DPKPA kabupaten minahasa selatan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA kabupaten minahasa selatan selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah pada

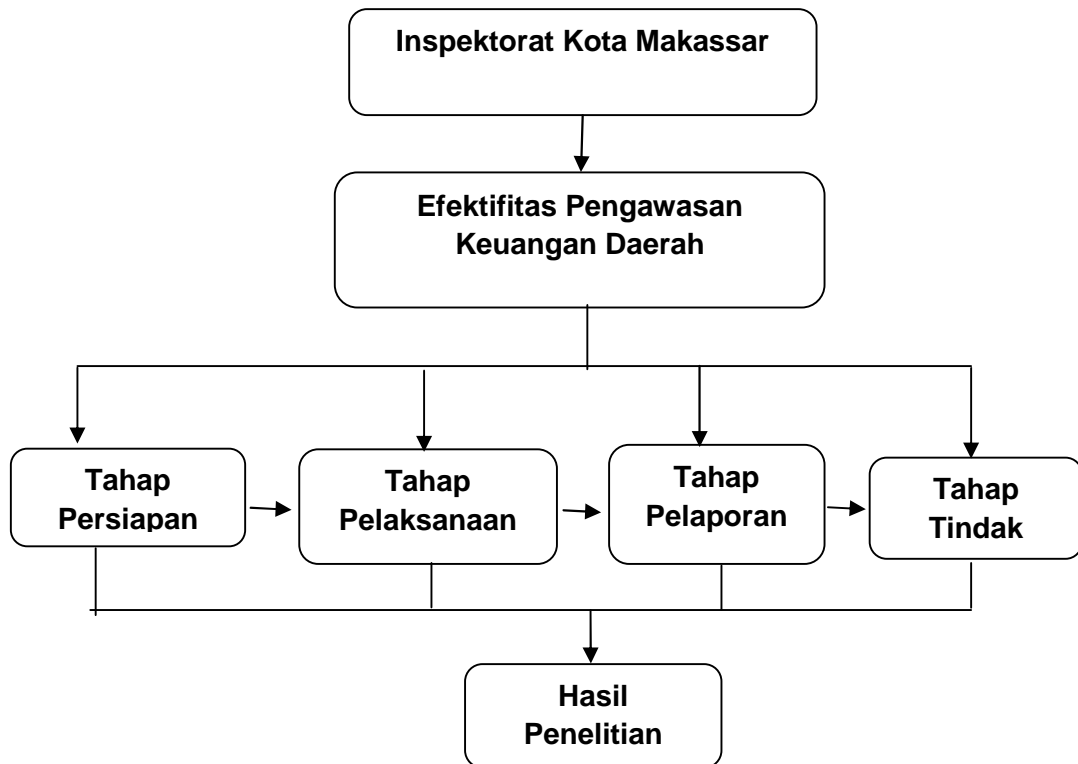
					DPKPA kabupaten minahasa selatan sangat efektif.
--	--	--	--	--	--

E. Kerangka Fikir

Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah suatu badan (lembaga) yang merupakan bagian dari lembaga pemerintahan Kabupaten Enrekang yang dibentuk untuk melakukan pengawasan umum pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang, termasuk pengawasan bidang keuangan. Luasnya struktur pemerintahan daerah sangat berpengaruh terhadap pengawasa keuangan.

Oleh karena itu sangat diharapkan Inspektorat Daerah dapat menjalankan fungsinya sebaik mungkin sehingga proses pembangunan di daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terkait dengan itu, maka pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di daerah dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.

Secara singkat kerangka fikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berupa angka yang diperoleh dari jawaban yang diberikan kepada responden kemudian dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistik (Siregar, 2014). Sumber Data, dari penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer, data ini diperoleh melalui hasil wawancara atau observasi langsung di lapangan, tepatnya di tempat proses pelaksanaan pengawasan. Data primer pada penelitian ini yaitu kuesioner yang dibagikan pada karyawan inspektorat
- b. Data Sekunder, data ini diperoleh melalui hasil pengumpulan informasi dari pihak terkait dalam hal ini badan atau lembaga-lembaga terkait. Data sekunder pada penelitian ini adalah data laporan keuangan.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan tertuju pada badan (lembaga) terkait, yakni Inspektorat Daerah Kota Makassar Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah selama 2 (dua) bulan, mulai bulan April-Mei 2018.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi variabel yang terukur, yang mengemukakan definisi variabel-variabel dan indikator yang digunakan pada kerangka fikir dan pembahasan, serta alat analisisnya.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, maka berikut beberapa definisi operasional yang perlu dikemukakan dalam dalam penulisan ini, antara lain :

1. Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan atas anggaran belanja daerah yang di alokasikan untuk anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
2. Efektivitas pengawasan keuangan daerah adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah yang lebih berdayaguna dan meliputi tahapan.
 - a. Tahapan persiapan.
 - b. Tahapan pelaksanaan.
 - c. Tahapan pelaporan.
 - d. Tahapan tidak lanjut.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, jadi populasi bukan hanya orang tapi juga subyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. (Sugiyono,2011:80).

Populasi pada penelitian ini adalah auditor internal yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu, apa yang dipelejadi dari sampel itu, kesimpulan akan diberlakukan pada populasi, untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative.(sabar,2013:45).Karena jumlah populasi kurang dari 100 responden, maka metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi yaitu sebanyak 34 orang yang merupakan audit internal dan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kota Makassar.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Angket/kuisisioner adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban.
2. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau fariabel melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, agenda, atau hukum-hukumdan lain sebagainya.

F. Metode Analisis

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam memperoleh data ini Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kuantitatif.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain : jabatan, lama pengalaman kerja, keahlian khusus, lama menekuni keahlian khusus tersebut, latar belakang pendidikan, serta gelar profesional lain yang menunjang bidang keahlian. Alat analisis data ini disajikan dengan mengundang table distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi.

2. Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini uji kualitas data yang digunakan adalah uji kuesioner dengan menggunakan skala *Guttman*, dengan mengakumulasi jumlah responden yang menjawab ya dan yang menjawab tidak, adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$YA = \frac{\text{Jumlah jawaban YA}}{\text{Total responden}} \times 100\%$$

dan

$$TIDAK = \frac{\text{Jumla jawaban TIDAK}}{\text{Total responden}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Inspektorat Kota Makassar

Sejak terbentuknya inspektorat wilayah datu ii ujung pandang sudah ada pegawai yang di angkat khusus oleh menteri dalam negeri yang disebut pegawai “dipekerjakan”, dan sebelum berlakunya otonomi daerah terdapat 3 jenis pegawai yang ditempatkan yaitu pegawai daerah, pegawai pusat diperbantukan (DPB) dan pegawai pusat dipekerjakan (DPK).

Inspektorat wilayah datu ii ujung pandang pada awal berdirinya dipimpin oleh seorang kepala untuk pertama kalinya dipimpin oleh bapak Drs. H. Umar Gazali yakni tahun 1979-1981. Kemudian digantikan oleh bapak Drs. H. Andi Mappaewang. Beliau menjabat selama dua tahun yakni sampai tahun 1981-1982.

Pada tahun 1982-1985 kepala inspektorat wilayah datu ii ujung pandang dijabat oleh bapak Drs. H. Andi Ampa Uleng. Tahun 1985-1989 inspektorat wilayah kodya datu ii ujung pandang dipimpin oleh Bapak Drs. Basuki Iskandar. Selanjutnya dalam tahun 1989-1995 inspektorat wilayah kodya datu ii ujung pandang dipimpin oleh Bapak Drs. H. BR. Idrus Sitaba.

Masa selanjutnya, inspektorat wilayah datu ii ujung pandang dipimpin oleh Drs. Muh. Husni Madjid sampai dengan tahun 1997. Kemudian di tahun 1997-2000 jabatan kepala inspektorat digantikan oleh bapak Drs. Tandeng Tugi dengan masa jabatan selama kurang lebih

empat tahun yang selanjutnya di tahun 2000 inspektur wilayah dati II Ujung Pandang di jabat oleh bapak Drs. Alimuddin Wellang sampai dengan tahun 2002. Periode selanjutnya dipimpin oleh bapak H. Andi Baso Bachtiar sampai dengan tahun 2005. Setelah itu inspektorat wilayah kodya dati II berubah nomenklatur menjadi badan pengawas daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah kota Makassar nomor 15 tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah kota Makassar.

Pada saat perda nomor 17 tahun 2005 tersebut diberlakukan, kepemimpinan pada inspektorat kota Makassar selanjutnya dengan sebutan inspektur dijabat oleh Bapak Drs. H. Hamsiar, M.Si. hingga bulan desember tahun 2013.

Kepemimpinan sebagai inspektur Kota Makassar selanjutnya yakni tahun 2014 atau selama 1 tahun dijabat oleh bapak Drs. Muslim yang kemudian dilanjutkan oleh bapak Drs. Zainal Ibrahim, M.Si dan sampai saat ini yang sebelumnya juga bertugas sebagai inspektur pembantu pada inspektorat kota Makassar.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan professional.

b. Misi

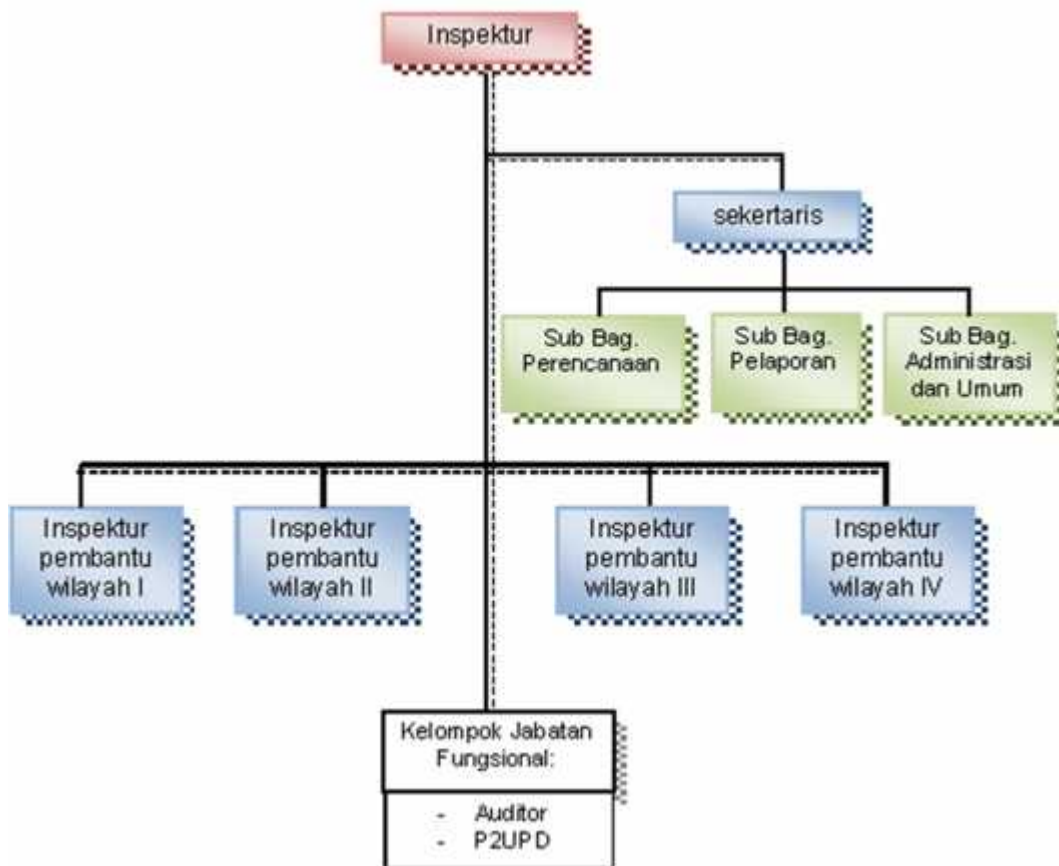
Terwujudnya pengawasan internal pemerintahan kota Makassar yang efektif.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi memegang peranan yang amat penting, karena menyangkut tugas dan tanggung jawab para pegawai yang ada didalamnya. Struktur organisasi dibuat agar maksud dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik karena dengan adanya struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab yang baik.

Pengorganisasian merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama dan hubungan yang harmonis antara bagian-bagian dalam suatu organisasi. Bagian-bagian yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan, alat yang digunakan serta metode yang digunakan dalam pengorganisasian. Bagian-bagian tersebut tergambar dalam struktur organisasi.

Sesuai dengan peraturan daerah kota Makassar no. 5 tahun 2005 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja inspektorat kota Makassar maka struktur organisasi Inspektorat daerah Kota Makassar terdiri dari Inspektur, sekretaris, sub bagian perencanaan, sub bagian evaluasi dan pelaporan, sub bagian administrasi umum, inspektur pembantu wilayah dan jabatan fungsional. Adapun gambaran struktur organisasi Inspektorat Kota Makassar adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

4. Uraian Pekerjaan

a. Inspektur

Inspektur kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional kepada semua satuan

organisasi dalam lingkup inspektorat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada inspektur.

c. Sub bagian perencanaan

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

d. Sub bagian pelaporan

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

e. Sub bagian administrasi dan umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, melaksanakan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan.

f. Inspektur pembantu wilayah

Inspektur wilayah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.

g. Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Deskriptif Data Atas Variabel Penelitian

1. Distribusi Data

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal dan anggota tim audit yang bekerja di kantor Inspektorat Kota Makassar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Proses distribusi data dilakukan selama kurang lebih dua bulan.

Data responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan pada penyebaran kuesioner yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Distribusi pengembalian kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang kembali	34	97%
2	Kuesioner yang tidak kembali	1	3%
Total kuesioner		35	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Jumlah populasi sebanyak 35 responden di Inspektorat kota Makassar, yang terdiri dari auditor internal dan anggota tim audit. Penelitian ini telah secara langsung memberikan kuesioner kepada 35

responden, tetapi peneliti hanya memperoleh kembali kuesioner sebanyak 34 kuesioner yaitu sebanyak 97% sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 1 orang atau sebesar 3%. Adapun dari kuesioner yang tidak kembali disebabkan karena responden tidak berada ditempat saat pengumpulan kuesioner. Dari tabel distribus kuesioner diatas akan nampak pada grafik 4.1 :



Jumlah pernyataan dalam kuesioner tersebut yaitu sebanyak 20 item.

2. Karakteristik Responden

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
Pria	13	38%
Wanita	21	62%
total	34	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah wanita yang berjumlah 21 orang atau sebesar 62% dan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 13 orang atau sebesar 38% dari total responden di Inspektorat kota Makassar. Dari tabel diatas dapat di lihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Data diolah oleh peneliti

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 4.3

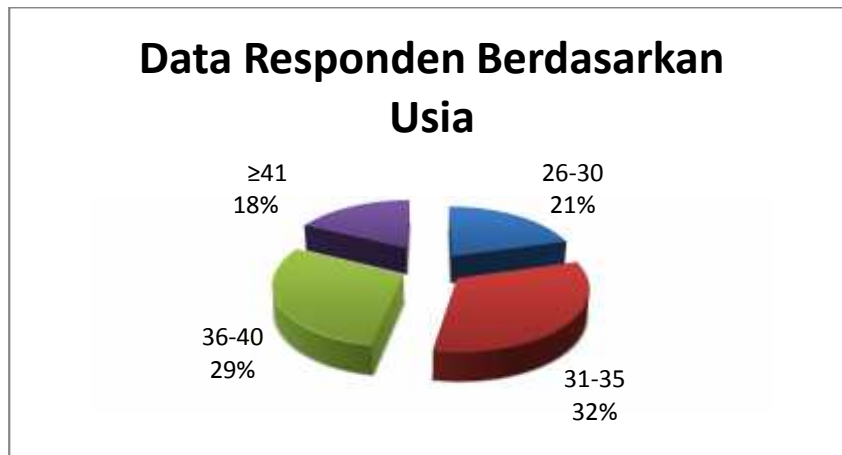
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Usia(Tahun)	Tingkat pendidikan	Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
26-30	9%	D3	7	21%
31-35	59%	S1	11	32%
36-40	32%	S2	10	29%
41	0%	D3	6	18%
TOTAL	100%	34	34	100%

Sumber :Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 26-30 tahun yang tingkat pendidikannya 9% yang berjumlah 7 orang atau sebanyak 21%, usia 31-35 tahun yang tingkat pendidikannya 59% yang jumlah respondennya sebanyak 11 orang atau 32%, usia 36-40 tahun yang tingkat pendidikannya 32% sebanyak 10 orang atau 29% dan responden yang berusia 41 tahun tingkat pendidikannya 0% yang jumlah respondennya sebanyak 6 orang atau 18%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun yang merupakan auditor internal maupun anggota tim audit pada

Inspektorat kota Makassar. Dari tabel diatas dapat di lihat pada grafik dibawah ini .



Sumber :Data diolah oleh peneliti

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

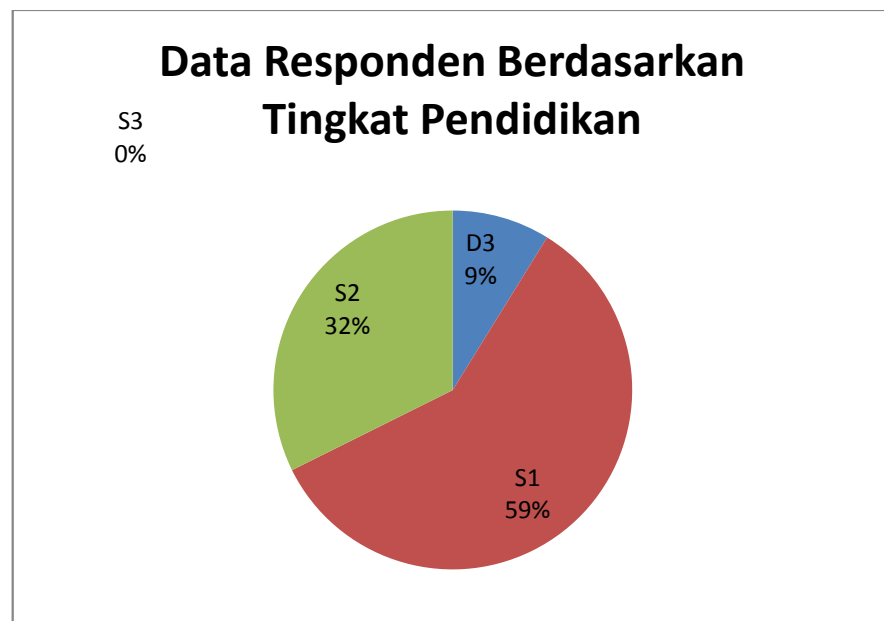
Tabel 4.4

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
D3	3	9%
S1	20	59%
S2	11	32%
S3	0	0%
TOTAL	34	100%

Sumber :Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 3 orang atau 9%, S1 sebanyak 20 orang atau 59%, S2 sebanyak 11 orang atau 32%, dan tidak adanya rerponden dengan pendidikan terakhir S3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden pada Inspektorat Kota Makassar adalah S1 dan dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Sumber :Data diolah oleh peneliti

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

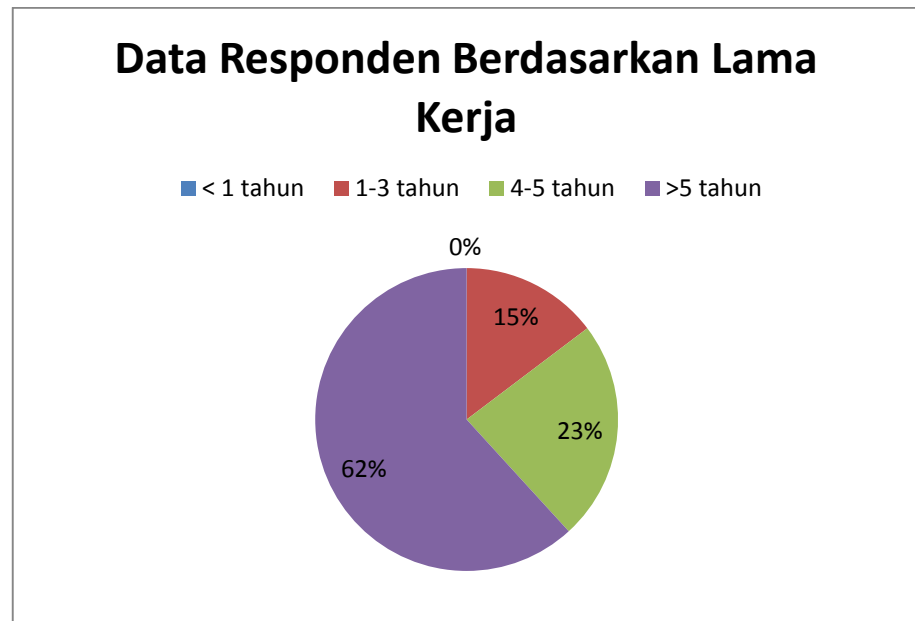
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 1 tahun	0	0%
1-3 Tahun	5	15%
4-5 Tahun	8	23%
>5 Tahun	21	62%
TOTAL	34	100%

Sumber :Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak ada responden dengan lama bekerja <1 tahun, responden dngan lama bekerja 1-3 tahun sebanyak 5 orang atau 15%, responden dengan lama bekerja 4-5 tahun sebanyak 8 orang atau 23%, dan responden dengan lama bekerja >5 tahun sebanyak 21 orang atau 62%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja diatas 5 tahun, uraian tersebut dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Sumber :Data diolah oleh peneliti

C. Hasil Penelitian

Untuk menilai efektifitas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan pengawasan berikut ini:

1. Tahapan Persiapan Pengawasan

Berdasarkan tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa efektifitas pengawasan oleh inspektorat kota Makassar pada tahap persiapan pengawasan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Tanggapan responden atas efektifitas pengawasan
pada tahap persiapan

No. Pertanyaan	Uraian	Alternatif Jawaban		Jumlah
		YA	TIDAK	
1.	F	34	0	34
	%	100%	0%	100%
2.	F	31	3	34
	%	91%	9%	100%
3.	F	27	7	34
	%	79%	21%	100%
Akumulasi jawaban dari alternative jawaban	F	92	10	102
	%	90%	10%	100%

Sumber: Data dioalah oleh peneliti

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan Inspektorat kota Makassar pada tahap persiapan telah berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden atas tiga pertanyaan yang diajukan dimana responden yang menjawab YA sebanyak 92 orang atau sebanyak 90% dan yang menjawab TIDAK sebanyak 10 orang atau sebanyak 10%.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa efektifitas pengawasan oleh inspektorat kota Makassar pada tahap pelaksanaan pengawasan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Tanggapan responden atas efektifitas pengawasan pada tahap pelaksanaan pengawasan

No. Pertanyaan	Uraian	Alternatif Jawaban		Jumlah
		YA	TIDAK	
1.	F	29	5	34
	%	85%	15%	100%
2.	F	30	4	34
	%	88%	12%	100%
3.	F	34	0	34
	%	100%	0%	100%
4	F	32	2	34%
	%	94%	6%	100%
Akumulasi jawaban dari alternative jawaban	F	125	11	136
	%	92%	8%	100%

Sumber: Data dioalah oleh peneliti

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan inspektorat kota Makassar pada tahap pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden atas dua alternative jawaban YA sebanyak 125 orang atau sebanyak 92% dan TIDAK sebanyak 11 orang atau sebanyak 8%.

3. Tahapan Penyusunan Pelaporan

Berdasarkan tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa efektifitas pengawasan oleh

inspektorat kota Makassar pada tahap penyusunan pelaporan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Tanggapan responden atas efektifitas pengawasan pada tahap penyusunan pelaporan

No. Pertanyaan	Uraian	Alternatif Jawaban		Jumlah
		YA	TIDAK	
1.	F	24	10	34
	%	71%	29%	100%
2.	F	21	13	34
	%	62%	38%	100%
3.	F	27	7	34
	%	79%	21%	100%
4	F	34	0	34%
	%	100%	0%	100%
Akumulasi jawaban dari alternative jawaban	F	106	30	136
	%	78%	22%	100%

Sumber: Data dioalah oleh peneliti

Berdasarkan data pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan inspektorat kota Makassar pada tahap penyusunan pelaporan berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden atas dua alternative jawaban yang diajukan dimana responden yang menjawab YA sebanyak 106 orang atau sebanyak 78% dan yang menjawab TIDAK sebanyak 30 orang atau sebanyak 22%.

4. Tahapan Penunjang Proses Pengawasan

Berdasarkan tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa efektifitas pengawasan oleh inspektorat kota Makassar pada tahapan penunjang proses pengawasan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8

Tanggapan responden atas efektifitas pengawasan pada tahap penunjang proses pengawasan

No. Pertanyaan	Uraian	Alternatif Jawaban		Jumlah
		YA	TIDAK	
1.	F	34	0	34
	%	100%	0%	100%
2.	F	34	0	34
	%	100%	0%	100%
3.	F	31	3	34
	%	91%	9%	100%
4	F	32	2	34%
	%	94%	6%	100%
5	F	30	4	34
	%	88%	2%	100%
Akumulasi jawaban dari alternative jawaban	F	161	9	170
	%	95%	5%	100%

Sumber: Data dioalah oleh peneliti

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan inspektorat kota Makassar pada pada tahap penunjang proses pengawasan berjalan secara efektif.

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden atas dua alternative jawaban yang diajukan dimana responden yang menjawab YA sebanyak 161 orang atau sebanyak 95% dan yang menjawab TIDAK sebanyak 9 orang atau sebanyak 5%.

D. Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat kota Makassar untuk setiap tahapan pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara efektif. Hasil dilihat dari tanggapan responden atas pengawasan pada tahap penunjang proses pengawasan yang menunjukkan responden yang menjawab ya lebih besar dari responden yang menjawab tidak. Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rinto dkk (2015) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan sangat efektif.

Della dkk (2017) juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan terdapat pengaruh antara kompetensi sumber dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2015) yang menyimpulkan bahwa indikator tujuan pengawasan cukup efektif karena berkurangnya jumlah penelitian negara/daerah dan tidak adanya temuan berulang dari tahun sebelumnya.

Efektifitas pengawasan keuangan daerah sangat mempengaruhi kualitas kinerja dan hasil laporan keuangan SKPD yang ada karena mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan oleh setiap SKPD.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai efektifitas pengawasan daerah yang dilakukan oleh inspektorat kota Makassar ternyata dapat disimpulkan bahwa persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan dan penunjang proses pengawasan telah berjalan secara efektif.
2. Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Makassar adalah meliputi aparatur yang memiliki skill (telah mengikuti DIKLAT), pengetahuan dibidang pekerjaan yang ditangani, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan di kota Makassar yang dilakukan oleh inspektorat kota Makassar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pimpinan inspektorat kota Makassar selaku *top leader* agar lebih meningkatkan lagi fungsi inspektorat sebagai lembaga pengawasan di kota Makassar guna tercapainya pemerintahan yang bersih dan sehat.
2. Mengusahakan agar terselenggaranya aparatur pengawas yang bersih dan memiliki rasa tanggungjawab dalam menangani setiap pekerjaan yang berhubungan dengan efektifitas pengawasan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, Abubakar Hamzah, Muhammad Nasir. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Aceh Barat Pada Masa Otonomi. Jurnal Volume 2, No. 3, Agustus 2014
- Achmad Faisal Daulay, Muhammad Arfan, Hasan Basri, 2015. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern terhadap efektivitas pengelolaan keuangan satu anker japerangkat daerah, Kota Lhokseumawe. Jurnal Vol. 4 No 3, Agustus 2015
- Anton Trianto. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. Jurnal Email : Katon
- Azhar Ruddin, Efektivitas pengawasan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Sigi, Jurnal Katalogis, Vol 3 no 2, Februari 2015 Hal 35-44
- Afrizal, Muhammad Arfan, Darwanis. Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang. Jurnal Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- Abdul Halimv A. 2011. Pengelolaan Keuangan Negara, Penerbit UPP STIM YPKPN, Jakarta
- Abdul Halim A. 2012. Manajemen Keuangan Daerah dan Pengelolaan Daerah, Edisi 3 Penerbit BPYE, Yogyakarta
- Cheris Enjelita Kaunang, Amran T Naukoko, Albert T Londa. Analisis Kinerja Pengelolaan keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Kota Manado Tahun 2010-2014). Jurnal Volume 16, No. 2 Tahun 2016.
- Dicka Bella Murtika Sari, Anita Wiyanti, Endang Mositoh, 2017. Pengaruh system pengendalian intern pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah.
- Echols M,J, dan Shadli. 1976. Kamus Inggris-Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Harahap S.S. 2009. Sistem Informasi Manajemen (Management control System). Penerbit Quantum, Jakarta
- Kumpulan Peraturan Daerah. 2006. UU 33/2004. Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Penerbit Deka Mandiri, Jakarta
- Munir D., Djuanda H.A, dan Tangkisan H.N.S. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit YPAPI, Yogyakarta

- Nurdiansyah, Denny. 2011. *Statistical Data Analyst: Uji Asumsi Klasik Regresi Linier*.
- NovlieManopo, Debby ChRotinsulu, Sri Murni. Analisis Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Minahasa.
- Novelya Suoth, Jantje Tinangon, Sintje Rondonuwu. Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Vol. 4 No. 1 Maret 2016*, hal. 613-622.
- Ritno H. Rondonowo, Jantje J. Tinangan Novi Budiarmo, 2015. Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa, *Vol 3 No 4 Desember 2015 Hal 23-3*
- Rahardjo Adisasmita, *pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*, 2011, penerbit graham ilmu, Yogyakarta
- Siregar, S. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual*. Kencana: Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit AFABETA, cv.
- Sabar, 2014. *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP Universitas Muria Kudus.
- Skripsi Eko Santoso. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi.
- Skripsi Shinta Lillati. 2011. Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus).
- Williams C. 2001. *Manajemen*, Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Kuesioner Penelitian**KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di-

Tempat

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Maka untuk keperluan tersebut saya sangat membutuhkan data-data analisis sebagaimana daftar kuesioner terlampir. Adapun judul skripsi yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah “ **Evektifitas Pengawasan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat Pemerintah Kota Makassar (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Makassar).**”

Atas kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab kuesioner ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya,

Hermin

A. Data Responden

Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan data diri Bapak/Ibu/Saudara.

Nama Responden : _____ *)

Usia : 25 26-30
 31-35 36-40
 41

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Pendidikan Terakhir : D3 S1
 S2 S3

Lama Bekerja : < 1 tahun 1-3 tahun
 4-5 tahun > 5 tahun

*) Boleh tidak diisi

Bapak/Ibu/saudara yang kami hormati, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara menjawab pertanyaan dibawah ini dengan tanda (✓). Pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kuesioner ini disebarakan dalam rangka penelitian skripsi akuntansi.

NO	Pertanyaan	YA	TIDAK
Persiapan pengawasan			
1	Apakah saudara melakukan pengumpulan informasi mengenai obyek/sasaran yang akan diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap keuangan daerah?		
2	Apakah saudara melakukan pengawasan dengan menyusun suatu Program Kerja Pemeriksaan (PKP) sebagai pedoman pengawasan?		
3	Apakah sebelum melakukan pemeriksaan saudara menyusun suatu		

	program kerja pemeriksaan sebagai pedoman pengawasan?		
Pelaksanaan pengawasan			
4	Apakah saudara melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan obyek yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan?		
5	Apakah saudara melakukan pemeriksaan terhadap obyek pengawasan keuangan daerah secara terperinci?		
6	Apakah saudara memberikan surat teguran/surat perintah penerbitan kepada tiap dinas/instansi yang terbukti melakukan penyimpangan?		
7	Apakah saudara melakukan temu akhir kepada walikota untuk melaporkan pelaksanaan pemeriksaan?		
Penyusunan laporan			
8	Apakah saudara melakukan presentasi dari hasil pemeriksaan antar anggota tim pemeriksa?		
9	Apakah saudara melakukan nota dinas pengantar hasil pemeriksaan?		
10	Apakah saudara melakukan surat petunjuk hasil pemeriksaan kepada walikota?		
11	Apakah saudara membuat laporan hasil pemeriksaan sebagai hasil akhir dari hasil pemeriksaan tersebut?		
Penunjang proses pengawasan			
12	Apakah saudara mendapatkan DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan) sebelum menjadi tim pengawas/pemeriksa?		

13	Apakah saudara sebelum melakukan pengawasan dibentuk dan dibagi menjadi beberapa tim pemeriksa ke setiap dinas/instansi?		
14	Apakah saudara dalam melakukan pengawasan memberlakukan target waktu terhadap para anggota pemeriksa?		
15	Apakah saudara memperhatikan pengaduan dari masyarakat dalam memberlakukan target pemeriksaan?		
16	Apakah biaya yang dikeluarkan saudara dalam setiap pemeriksaan, telah sesuai dengan anggaran dana biaya pemeriksaan regular Inspektorat Kota Makassar yang telah dianggarkan APBD?		

BIOGRAFI PENULIS



Nama Hermin, lahir di Patonjok pada tanggal 07 Desember 1994, anak pertama dari 7 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Attong dan Ibu Upa jenis kelamin perempuan, agama islam, berkewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Tongkonan Basse' kec. Masalle, Kab. Enrekang.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu, pendidikan Sekolah Dasar di SDN 158 Mundan lulus tahun 2007, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Baroko' lulus tahun 2010, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMA Negeri 2 Enrekang lulus tahun 2013, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.